

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, semakin banyak penelitian yang meneliti berbagai fenomena yang berkaitan dengan laporan keberlanjutan. Literatur beberapa tahun terakhir menggambarkan minat yang meningkat dalam penelitian laporan keberlanjutan perusahaan, dimana perusahaan dimintai pertanggungjawaban atas kejadian atau dampak yang mempengaruhi masyarakat dan lingkungan (Naseem et al. 2017). Menurut Munsaidah, Andini, and Supriyanto (2016) menjelaskan tanggung jawab sosial lingkungan sebagai konsep akuntansi yang baru merupakan transparansi pengungkapan sosial lingkungan atas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak hanya berfokus pada *single bottom lines* yaitu tanggung jawab perusahaan yang terbatas hanya pada kondisi keuangan saja, akan tetapi juga harus berfokus pada *triple bottom lines* yaitu tanggung jawab perusahaan pada aspek sosial, lingkungan dan keuangan. Hal ini bertujuan untuk melegitimasi keberadaan perusahaan dilingkungan masyarakat dan pengungkapan tanggung jawab sosial lingkungan merupakan cara perusahaan berkomunikasi dengan masyarakat untuk menjalin hubungan yang baik.

Di sisi lain, Munsaidah, Andini, dan Supriyanto (2016) menerangkan bahwa isu mengenai peran perusahaan terhadap lingkungan menjadi perhatian yang sangat besar bagi masyarakat, kesadaran akan dampak operasi perusahaan terhadap kondisi sosial dan lingkungan hidup turut semakin

meningkat. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi informasi dan internet yang begitu pesat memberikan wadah atau media bagi masyarakat untuk berpendapat dan memberikan protes atas dampak operasi perusahaan yang dirasa mengganggu kelangsungan sosial dan lingkungan hidup masyarakat. Oleh karena itu, hal ini mulai menekan perusahaan untuk melakukan dan mengungkapkan pertanggungjawaban sosial lingkungannya, karena masyarakat menganaggap perusahaan telah menggunakan sumberdaya yang ada dilingkungan mereka sebagai penggerak aktivitas bisnis perusahaan. Berangkat dari pemikiran itulah kalangan pebisnis diindonesia harus bertindak bagaimana mengelola bisnis yang tidak hanya mencari keuntungan semata namun juga mempertimbangkan etika, sosial dan lingkungan. Tiga pilar tersebut menjadi acuan bisnis yang baik akhir akhir ini (Munsaidah, Andini, and Supriyanto 2016).

Disamping itu, pemerintah sebagai lembaga negara yang menjamin kesejahteraan masyarakat turut ambil andil dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas laporan tanggung jawab sosial lingkungan yang harus perusahaan laporkan diindonesia. Hal ini terlihat dari kinerja pemerintah yang mulai membuat regulasi mengenai pelaporan tanggung jawab sosial lingkungan diindonesia (Himpunan Pemerhati Lingkungan Hidup Indonesia). Niat baik pemerintah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup juga dapat dilihat saat manatan persiden indonesia, Susilo Bambang Sudhoyono yang menyatakan bahwa indonesia mau mengurangi emisi sampai 26 persen di tahun 2020, merencanakan pengurangan satu miliar ton CO₂ di tahun 2050,

berusaha membuat kehutanan menjadi area penyerapan karbon di tahun 2030, melanjutkan kebijakan efisiensi bahan bakar, dan menjadikan transportasi umum lebih ramah lingkungan dalam 10 tahun mendatang dalam pertemuan para pemimpin G-20 di Pittsburg, sebagai mana yang dilansir oleh Himpunan Pemerhati Lingkungan Hidup Indonesia.

Di Indonesia sendiri, tanggung jawab sosial dan lingkungan sekarang dinyatakan tegas dalam UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 pasal 74, yang menyatakan bahwa (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajiban. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ndangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dalam peraturan pemerintah. Peraturan lain yang menyinggung tanggung jawab sosial lingkungan adalah UU No.25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Pasal 15 (b) menyatakan bahwa setia penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan.

Salah satu majalah CSR indonesia menyebutkan bahwa, tahun 2005 merupakan tonggak laporan keberlanjutan diindonesia dimana untuk pertama kalinya National Center for Sustainability Report (NCSR) menyelenggarakan

penilaian kepada perusahaan yang telah mengembangkan laporan keberlanjutan dan CSR yang merujuk pada kaidah yang diusung Global Reporting Initiative (GRI) berbasis di Belanda. Pada kompetisi itu catatan menunjukkan bahwa sampai akhir tahun 2013 sebanyak 50 perusahaan telah membuat laporan keberlanjutan. Sementara itu tiga tahun kemudian Media Indonesia melansir bahwa pada *Sustainability Report Award* yang ke 12 diakhir 2016 tercatat 120 perusahaan telah ikut serta dalam menerbitkan laporan keberlanjutan diindonesia, namun jumlah ini masih jauh dibawah jumlah perusahaan terbuka yang tercatat di bursa apalagi jika di bandingkan dengan jumlah seluruh perusahaan yang ada diindonesia. Meskipun demikian informasi tersebut menunjukkan adanya peningkatan pelaporan tanggung jawab sosial lingkungan yang dilakukan oleh pelaku bisnis dari tahun ke tahun. Hal ini tentu menarik untuk mengetahui faktor apa yang telah mendorong peningkatan laporan tanggung jawab sosial lingkungan pada laporan keberlanjutan perusahaan diindonesia.

Banyak penelitian terdahulu yang membahas mengenai faktor faktor pendorong pengungkapan laporan keberlanjutan. Salah satunya adalah penelitian oleh Xu and Zeng (2016) yang menguji hubungan antara variabel profitabilitas, kepemilikan pemerintah dan kebijakan pajak perusahaan dengan variabel *corporate social responsibility* pada perusahaan di Cina. Hasil yang ditemukan oleh Xu dan Zeng (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas dan kepemilikan pemerintah berhubungan positif dengan *corporate socila responsibility* sedangkan kebijakan pajak berhubungan

negatif dengan *corporate social responsibility* namun hubungannya rendah. Xu dan Zeng (2016) menjelaskan bahwa kepemilikan pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan dikarenakan kebijakan pemerintah dicina mempunyai pengaruh yang kuat terhadap keberlangsungan perusahaan.

Beberapa peneliti sebelumnya berfokus pada topik topik khusus yang berkaitan dengan pelaporan keberlanjutan, seperti yang dilakukan oleh Klovienne and Speziale (2014); Perez (2015) atau spesifik pada negara tertentu sebagai mana yang dilakukan oleh Branco and Delgado (2011); Guan and Noronha (2013) sementara peneliti lainnya seperti Burritt and Schaltegger (2010); Hahn and Kühnen (2013) menggunakan pendekatan yang lebih umum. Beberapa penelitian tersebut telah menganalisis mengenai laporan keberlanjutan maupun berbagai jenis laporan terkait keberlanjutan (misalnya dengan hanya memperhatikan masalah sosial dan atau lingkungan). Praktik pelaporan telah berubah sejak tahun 1970an di berbagai negara (Fifka 2013; Hahn and Kühnen 2013). Sementara itu Gray, Kouhy, dan Lavers (1995) menjelaskan bahwa negara tempat perusahaan melakukan laporan keberlanjutan memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan yang diungkapkan. Oleh karena itu penting untuk memahami kondisi di berbagai negara dan membandingkan temuannya khususnya penelitian di Indonesia. Berawal dari hal tersebut penelitian ini dilakukan untuk menambah literatur penelitian dengan topik laporan keberlanjutan di indonesia dengan fokus pada laporan tanggung jawab lingkungan.

Penelitian ini menguji variabel yang diperkirakan mendorong pengungkapan kuantitas informasi tanggung jawab lingkungan pada laporan keberlanjutan perusahaan yang ada di Indonesia untuk tahun 2015 sampai 2016. Lebih spesifik, lima variabel digunakan dalam penelitian yaitu, umur perusahaan, kepemilikan pemerintah, *growth opportunity*, ukuran perusahaan dan profitabilitas. Kemudian digunakan variabel kontrol yaitu tipe industri (*low profile dan high profile*). Meskipun UU no 40 tahun 2007 pasal 74 tidak mewajibkan perusahaan *low profile* untuk melakukan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan, data perusahaan *low profile* tetap digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini dengan tujuan untuk membandingkan dan melihat perilaku pelaporan tanggung jawab lingkungan pada kedua tipe industri tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang dapat disusun adalah:

- a. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap kuantitas pengungkapan informasi tanggung jawab lingkungan pada laporan keberlanjutan?
- b. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap kuantitas pengungkapan tanggung jawab lingkungan pada laporan keberlanjutan?
- c. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kuantitas pengungkapan informasi tanggung jawab lingkungan pada laporan keberlanjutan?
- d. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kuantitas pengungkapan informasi tanggung jawab lingkungan pada laporan keberlanjutan?

- e. Apakah *growth opportunity* berpengaruh terhadap kuantitas pengungkapan informasi tanggung jawab lingkungan pada laporan keberlanjutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa hubungan antara

- a. Umur perusahaan terhadap kuantitas pengungkapan informasi tanggung jawab lingkungan pada laporan keberlanjutan
- b. Kepemilikan pemerintah terhadap kuantitas pengungkapan informasi tanggung jawab lingkungan pada laporan keberlanjutan
- c. Ukuran perusahaan terhadap kuantitas pengungkapan informasi tanggung jawab lingkungan pada laporan keberlanjutan
- d. Profitabilitas terhadap kuantitas pengungkapan informasi tanggung jawab lingkungan pada laporan keberlanjutan.
- e. *Growth opportunity* terhadap kuantitas pengungkapan informasi tanggung jawab lingkungan pada laporan keberlanjutan

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi penelitian yang akan datang.

- b. Manfaat Praktis

- 1. Bagi pihak perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai referensi perusahaan dalam mengembangkan strategi pertanggungjawaban lingkungan dalam

laporan keberlanjutan. Sehingga dapat memberikan manfaat dengan maksimal bagi masyarakat dan perusahaan.

2. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi investor dalam melihat pelaporan tanggung jawab lingkungan di Indonesia dan proses pengambilan keputusan dalam berinvestasi.